

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENYERAPAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DENGAN KINERJA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

(Studi Empiris pada Pemda di Indonesia Tahun 2017-2018)

GUPITA CHIKA RANI

Chikagupita11@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

***Abstract:** This study aims to determine the effect of fiscal decentralization, efficiency and effectiveness on the financial reporting accountability of local governments in Indonesia and the role of performance as a moderating variable. This study uses regional independence and regional dependence on the central government as a proxy for fiscal decentralization and the level of local government performance to measure performance. This study also uses the audit opinion of the Financial Examination Board (BPK) to measure the accountability of local government financial reporting. In this study 967 districts / cities in Indonesia were used during the 2017-2018 period which were selected based on purposive sampling. This study uses logistic regression using the SPSS V.15 software application. The results of this study indicate that regional independence and regional dependence on the central government affect the accountability of local government financial reporting. While the efficiency and effectiveness of budget absorption does not affect the accountability of local government financial reporting. While the performance of local governments can moderate the relationship of regional independence and regional dependence on the central government for the accountability of local government financial reporting.*

Keywords: Fiscal Decentralization, Efficiency, Effectiveness, Accountability, Performance

PENDAHULUAN

Setelah berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto selama hampir 32 tahun, 1998 merupakan akhir dari pemerintahan orde baru, sekaligus menjadi awal negara Indonesia dalam memulai pemerintahan baru, yaitu era reformasi Irmawati (2015) pada pemerintahan era reformasi Indonesia mengubah sistem pemerintahannya dari yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralistik, dengan tujuan memberikan perubahan kearah yang lebih baik dan menciptakan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia (Salma, 2018). Sistem desentralisasi fiskal mulai berlaku di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Fenomena akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut karena Badan Pengawas

Keuangan (BPK) setiap tahunnya memberikan penilaian berupa opini terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketika suatu pemerintah daerah telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, maka dapat dikatakan bahwa laporan yang disajikan oleh pemerintah daerah tersebut mempunyai akuntabilitas yang baik. BPK menemukan, masih banyak terdapat permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hal ini mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 1,54 triliun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun 2017. Selain itu, masih banyak ditemukan belanja tidak sesuai, biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi yang terjadi pada 54 pemda di Indonesia (BPK, 2016).

Hal tersebut membuktikan bahwa beberapa pemerintah daerah belum dapat memaksimalkan dana transfer yang di berikan oleh pemerintah pusat, padahal tujuan utama dari pemerintah pusat dalam memberikan dana transfer adalah agar pemerintah daerah tersebut menjadi mandiri dalam mengelolanya supaya dana tersebut dapat digunakan sebagai modal awal dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar pemerintah daerah tidak bergantung pada pemerintah pusat, serta dapat bertanggungjawab atas aktivitas keuangannya. Masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi atas apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kinerja pemda dapat mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari jumlah penurunan Pemerintah Daerah yang tidak melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta peningkatan jumlah indeks kerja pemerintah daerah di Kabupaten/kota (Fontanella, 2014).

Hasil penelitian mengenai desentralisasi fiskal, efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran masih terdapat banyak inkonsistensi hasil (lihat Mudhofar 2017 ; Fontanella 2014; Irmawati 2015), sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai desentralisasi fiskal, efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran untuk mengetahui konsistensi temuan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal, efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Teori stewardship sering disebut sebagai teori pengelolaan (penatalayanan), teori stewardship didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seorang manajer tidak memiliki kepentingan individu, tetapi lebih mengupayakan kepentingan dan keinginan principal, serta

mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain (Davis, 1997). Teori stewardship memandang bahwa pihak manajemen dalam organisasi pemerintah daerah diasumsikan sebagai steward/ penatalayanan yang bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tujuan organisasi, menggunakan pendekatan governance atas dasar psikologi dan sosiologi yang telah didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi manajemen sebagai stewards (pelayan) dapat termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan principal dan organisasi.

Penurunan Hipotesis

Kemandirian Daerah Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemda yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi akan mampu membiayai sendiri pemerintahannya, hal tersebut dapat dilihat dari semakin baik opini audit Pemda, maka akan mempunyai kemungkinan nilai akuntabilitasnya semakin baik. Maka dapat disimpulkan semakin baik nilai kemandirian suatu pemda maka akan mempunyai kemungkinan semakin baik juga nilai akuntabilitasnya, dari uraian tersebut maka hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁ : Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah

Ketergantungan Pemerintah daerah Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan adanya tingkat tanggungjawab yang tinggi dari pemerintah daerah dalam pengelolaannya, maka pemda tersebut akan semakin mandiri hal tersebut dapat dikatakan tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat semakin rendah, maka nilai akuntabilitasnya semakin baik, maka dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, maka akan semakin buruk nilai akuntabilitasnya. Berdasarkan argumen diatas, maka diajukan hipotesis yang kedua adalah :

H₂ : Ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah

Efisiensi Penyerapan Anggaran dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Semakin kecil rasio dari perbandingan diatas, maka akan semakin efisien dan begitu pula sebaliknya. Suatu organisasi akan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan

keluaran (*output*) tertentu dengan biaya (*input*) yang serendah-rendahnya, atau bisa juga sebaliknya yaitu dengan masukan tertentu dengan keluaran sebesar-besarnya Julita (2013).

Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat efisiensi penyerapan anggaran suatu daerah maka akan mempunyai kemungkinan semakin baik juga akuntabilitas pelaporan keuangannya, dan sebaliknya, maka dari argumen tersebut diajukan hipotesis yang ketiga adalah :

H₃ : efisiensi penyerapan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Efektivitas Penyerapan Anggaran dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan sebelumnya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dengan didasarkan pada potensi daerah yang ada. Dengan harapan semakin besar realisasi penerimaan PAD yang dibandingkan dengan target penerimaan PAD, maka semakin efektif, dan begitu sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat efektivitas penyerapan anggaran suatu pemerintah daerah, maka akan mempunyai kemungkinan semakin baik juga akuntabilitas pelaporan keuangan, berdasarkan argumen diatas, maka hipotesis keempat yang diajukan adalah :

H₄ : efektivitas penyerapan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah

Efek moderasi kinerja atas hubungan kemandirian daerah dan ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan

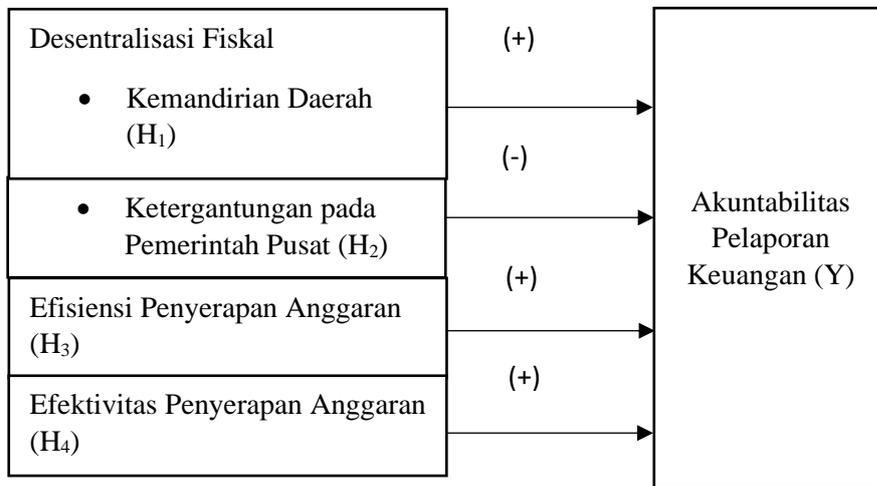
Kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan secara keseluruhan selama satu periode tertentu dalam melaksanakan sebuah tugas kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan secara keseluruhan selama satu periode tertentu dalam melaksanakan sebuah tugas. Teori stewardship memandang bahwa pihak manajemen dalam organisasi pemerintah daerah yang diasumsikan sebagai steward/penatalayanan diamanahi untuk bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan adanya tingkat kemandirian yang tinggi dan didukung dengan kinerja yang baik, maka daerah tersebut akan mempunyai kemungkinan memperoleh akuntabilitas yang baik juga, dari argumen tersebut maka hipotesis ke 5 yang diajukan adalah :

H₅ : kinerja pemerintah memoderasi hubungan kemandirian daerah dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia

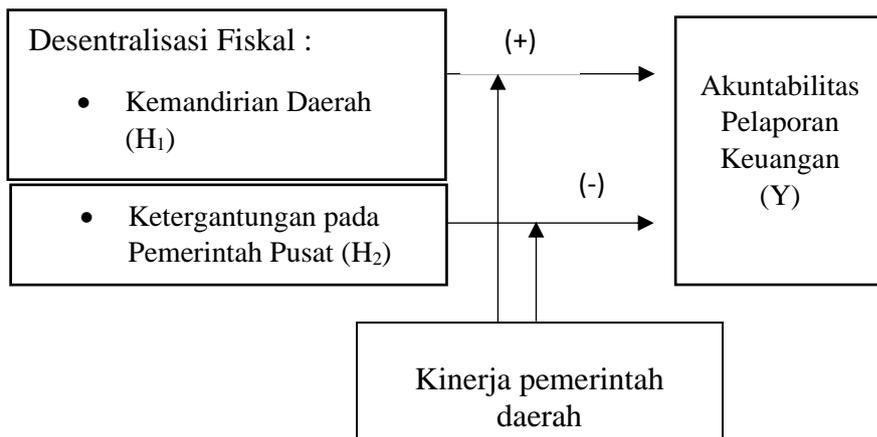
Penelitian mengenai kinerja pemerintah yang dilakukan oleh Fontanella, (2014), Mudhofar (2017) kinerja mempengaruhi pada hubungan ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. Maka hipotesis keenam yang diajukan adalah dengan adanya tingkat ketergantungan yang tinggi di dalam suatu pemerintah daerah, didukung dengan kinerja yang baik, maka akan ada kesempatan daerah tersebut dalam memperoleh akuntabilitas yang baik. Dari argumen tersebut, maka hipotesis 6 yang diajukan adalah :

H₆ : kinerja pemerintah memoderasi hubungan ketergantungan pada pemerintah pusat dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia

Model Penelitian 1 (tanpa moderasi)



Model Penelitian 2 (dengan moderasi)



MODEL PENELITIAN

Subjek, Objek dan Teknik Pengambilan Sampel penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2017-2018. Objek yang digunakan data realisasi anggaran pemerintah daerah pada tahun 2017-2018. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari website Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Dalam Negeri, data opini BPK yang bersumber dari www.bpk.go.id, data penilaian kinerja yang bersumber dari www.kemendagri.go.id. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya sebagai instrumen untuk kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik Irmawati (2015). Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, serta untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Pengukuran variabel akuntabilitas diukur dengan menggunakan variabel dummy, diberi skor 1 jika WTP dan diberi skor 0 jika selain WTP.

Variabel Indipenden

Desentralisasi Fiskal Desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom, dengan tujuan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Richard (2000) desentralisasi fiskal adalah pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah suatu Pemerintah Daerah. Variabel desentralisasi fiskal pada penelitian ini akan di proksikan menjadi tingkat kemandirian daerah dan ketergantungan pada pemerintah pusat seperti penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar, (2017) sebagai instrument dari desentralisasi fiskal.

Kemandirian daerah (X1) adalah kondisi dimana pemda sudah dapat membiayai sendiri kegiatan operasionalnya, tanpa tergantung kepada pemerintah pusat. Untuk mengukur kemandirian daerah dapat digunakan perbandingan rasio sebagai berikut :

$$kemandirian\ daerah = \frac{PAD}{total\ pendapatan}$$

Ketergantungan Pemerintah daerah pada pemerintah pusat adalah kondisi di mana pemerintah daerah hanya mengandalkan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah saja. Untuk mengukur ketergantungan dapat digunakan perbandingan rasio sebagai berikut :

$$\text{ketergantungan pada pemerintah pusat} = \frac{DAU + DAK}{\text{Total Pendapatan}}$$

Efisiensi Penyerapan Anggaran Efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output. Apabila suatu organisasi mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya maka suatu organisasi itu dapat dikatakan mempunyai perencanaan yang baik. Untuk menghitung tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah dilihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah ratio antara penerimaan daerah dengan belanja rutin, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut. Untuk mengukur efisiensi dapat digunakan perbandingan rasio sebagai berikut :

$$\text{efisiensi} = \frac{\text{biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan PAD}}{\text{realisasi penerimaan PAD}}$$

Efektivitas Penyerapan Anggaran Efektivitas penyerapan anggaran adalah keberhasilan suatu pemerintah dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh daerah tersebut. Mudhofar, (2017) dalam menghitung tingkat efektivitas dari sistem pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan data realisasi penerimaan dan target penerimaan. Dimana semakin besar presentase yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas pengelolaan daerah. Untuk mengukur tingkat efektivitas maka dapat digunakan rasio sebagai berikut :

$$\text{rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{target penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Variabel Moderasi

Kinerja Pemerintah Daerah Kinerja adalah presentasi yang dicapai dan diperoleh organisasi dalam periode tertentu yang berhubungan dengan penggunaan anggaran kualitas dan kuantitas terukur. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik kinerja yang dilakukan oleh pemda, maka semakin tinggi juga kemungkinan pemerintah daerah tersebut dalam memperoleh akuntabilitas yang tinggi, yang dapat dilihat dari opini audit. Untuk mengukur kinerja

pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan skor yang diberikan oleh kemendagri, yaitu skor EKPPD.

UJI KUALITAS DATA

Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa ada tujuan untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum disebut dengan statistic deskriptif (Suyanto, 2017) Analisi deskriptif mencakup nilai *mean*, *median*, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi yang diperoleh dari data penelitian.

UJI HIPOTESIS DAN ANALISIS DATA

Uji Regresi Logistik

Untuk menguji hipotesis 1-6 digunakan analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Karena penelitian ini menggunakan moderasi, terdapat 2 persamaan. Persamaan yang pertama digunakan untuk hipotesis 1-4 dan persamaan yang kedua digunakan untuk hipotesis 5 dan 6. Sehingga, persamaan regresi logistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Persamaan hiotesis 1-4 :

$$LN \frac{1}{APK} = a + b1.KD + b2.KPP + b3.EF + b4.EK + e$$

Keterangan:

APK	= Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
KD	= kemandirian daerah
KPP	= ketergantungan pada pemerintah pusat
EF	= Efisiensi penyerapan anggaran
EK	= Efektivitas penyerapan anggaran
KI	= Kinerja pemerintah
α	= konstanta
b	= koefisien regresi
e	= eror

Persamaan hipotesis 5 dan 6 :

$$LN \frac{1}{APK} = a + b1.KD + b2.KPP + b3.KI + b4.KI * KD + b5.KI * KP + e$$

Keterangan :

APK	= Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
KD	= kemandirian daerah
KPP	= ketergantungan pada pemerintah pusat
KI	= Kinerja pemerintah
α	= konstanta
b	= koefisien regresi
e	= eror

Uji Model Fit (*Overall Model Fit*)

Uji model fit dilakukan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan fit dengan data. Penilaian model fit dalam model regresi logistik memakai statistic yang didasarkan pada fungsi *likelihood*. Keseluruhan model yang dinilai dalam regresi logistik (*-2 log likelihood*) adalah penilaian terhadap *-2 log likelihood*. Dengan cara melihat angka *-2 log likelihood* di awal *block number = 0*, dan angka *-2 log likelihood* pada *blok number = 1*. Apabila terjadi penurunan dalam nilai *-2 log likelihood* (*blok number = 0 – blok number = 1*), maka model dapat di terima karena sesuai dengan data atau dapat dikatakan bahwa model fit dengan data.

Uji Hosmer dan Leweshow *Godness of Fit Test*.

Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan cara melihat nilai *Chi-Square uji Hosmer dan Leweshow*. Dengan keterangan apabila nilai p-value $> 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan antara model dengan data, tetapi jika nilai p-value $< 0,05$ maka terdapat perbedaan antara model dengan data Ghazali, (2016).

Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangatlah terbatas Ghozali, (2011). *Cox dan Snell's R square* merupakan ukuran yang meniru ukuran R^2 pada multiple regression yang didasarkan pada tekni estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit diimplementasikan. *Nagelkerke's R square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox dan Snell's* yang digunakan untuk memastikan bahwa nilainya

bervariasi, yaitu dari 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Nilai *Negelkerke's R²* dapat diimplementasikan seperti nilai *R²* pada *multiple Regression Ghazali*, (2016).

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N		Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Deviation
	Valid	Missing					
KD	967	0	0.00376	0.84473	0.13865	0.10504	0.119111
KPP	967	0	0.03273	0.90142	0.63153	0.64733	0.140781
EF	967	0	-103.941	13.43115	0.56355	0.94456	3.922001
EK	967	0	-1.38349	13096.62	18.9302	1.40858	423.3923
APK	967	0	0	1	0.8	1	0.403
KI	967	0	6237	38900	28722.4	29619	4431.053
M1	967	0	63.56706	22588.58	4053.75	2987.57	3587.263
M2	967	0	1013.965	29783.45	18041.2	18417.6	4704.048

Hasil uji statistik deskriptif variabel kemandirian daerah memiliki nilai minimum sebesar 0,00376 dan nilai maksimum variabel ketergantungan daerah sebesar 0.84473 dengan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.13865 dan nilai *median* sebesar 0.10504, dengan *standard deviation* sebesar 0.119111. Hasil uji deskriptif pada variabel ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat menunjukkan minimumnya sebesar 0,00376 dan nilai maksimum variabel ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat sebesar 0,84473 dengan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,63153 dan nilai *median* 0,64733, dengan nilai *standard deviation* sebesar 0,14078.

Hasil uji statistik deskriptif variabel efisiensi penyerapan anggaran memiliki nilai minimum sebesar -103,94059 dan nilai maksimum variabel efisiensi penyerapan anggaran sebesar 13,43115 dengan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,5635543 dan nilai *median* sebesar 0,944617, dengan *standard deviation* sebesar 3,92200072.

Hasil uji statistik deskriptif variabel efektivitas penyerapan anggaran memiliki nilai minimum sebesar -1,38349 dan nilai maksimum variabel efektivitas penyerapan anggaran sebesar 13096,62215 dengan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18,9301587 dan *median* sebesar 1,4085835 dengan *standard deviation* sebesar 423,39234663.

Hasil statistik deskriptif variabel akuntabilitas pelaporan keuangan memiliki nilai minimum sebesar 0, dan nilai maksimum variabel akuntabilitas pelaporan keuangan sebesar 1 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 0,80 dan *median* sebesar 1 dengan *standard deviation* sebesar 0,403. Hasil statistik deskriptif variabel kinerja pemerintah daerah memiliki nilai minimum sebesar 6237 dan nilai maksimum variabel kinerja pemerintah daerah sebesar 38900 dengan rata-rata (*mean*) 28722,35 dan *median* sebesar 29619 dengan *standard deviation* sebesar 4431,053.

Hasil statistik deskriptif variabel moderasi 1 memiliki nilai minimum sebesar 63,56706 dan nilai maksimum variabel moderasi 1 sebesar 22588,58168 dengan rata-rata

(mean) sebesar 4053,7528702 dan median sebesar 2987,5688850 dengan *standard deviation* sebesar 3587,26250747.

Uji Overall Model Fit

Table 2
Uji Model Fit

Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan -2LL Akhir

-2 Log Likelihood	Nilai	
	Model 1	Model 2
Awal (block Number: 0)	977,676	977,767
Akhir (Block Number: 1)	946,398	940,093

Tabel 2 menunjukkan -2LL awal (*block number = 0*) dan nilai -2LL akhir (*block number = 1*) model 1 dan model 2. Model 1 memiliki nilai -2LL awal (*block number = 0*) sebesar 977,676 dan nilai -2LL akhir sebesar 946,398 (*block number = 1*). Terdapat selisih penurunan sebesar 31,278, maka dapat diartikan bahwa model yang diuji fit dengan data. Tabel 2 menunjukkan bahwa model 2 memiliki -2LL awal (*block number = 0*) sebesar 977,676 dan nilai -2LL akhir sebesar 940,093 (*block number = 1*). Terdapat selisih penurunan sebesar 37,583, maka dapat diartikan bahwa model yang diuji fit dengan data.

Table 3
Overall Model fit

	Sampel Data		Chi-Square	df	Sig.	Keterangan
Model 1	Hipotesis 1-4	Step	31,279	4	0,000	Layak
		Block	31,279	4	0,000	
		Model	31,279	4	0,000	
	Sampel Data		Chi-Square	df	Sig.	Keterangan
Model 2	Hipotesis 5&6	Step	37,583	5	0,000	Layak
		Block	37,583	5	0,000	
		Model	37,583	5	0,000	

Pada tabel 3 adalah hasil dari pengujian kelayakan model 1 dan 2 dimana model 1 adalah pengujian untuk hipotesis 1-4, dan model 2 untuk hipotesis 5 dan 6. Hasil pengujian ini menggunakan *Omnibus Test of Model Coefficients*. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Omnibus Test of Model Coefficients* dapat dilihat bahwa model 1 memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$, dan model 2 memiliki nilai $0,000 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini memiliki data yang layak untuk di teliti.

Tabel 4
Uji Hasil Kelayakan Model

	Sampel Data	Chi-Square	Sig.	Keterangan
Model 1	Hipotesis 1-4	9,110	0,333	Layak
Model 2	Hipotesis 5&6	5,880	0,661	Layak

Pada tabel 4 menunjukkan hasil dari pengujian *Hosmer and Leweshow Test* yang digunakan untuk menguji kelayakan model dengan cara melihat hasil dari *Chi-Square* dan melihat nilai signifikansi. Model 1 memiliki hasil *Chi-Square* sebesar 9.110 dan nilai signifikansi sebesar $0,333 > \alpha 0,05$ dan model 2 memiliki hasil *Chi-Square* sebesar 5.880 dan nilai signifikansi sebesar $0,661 > \alpha 0,05$. Berdasarkan hasil dari *Hosmer and Leweshow Test* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa memiliki model yang layak digunakan untuk melanjutkan pengujian dalam penelitian.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi Model Penelitian 1

Hipotesis 1-4			
Step	2 Log Likelihood	Cox & Snell R Square	Negelkerke R Square
1	946,398	0,032	0,050

Berdasarkan pada tabel 5 model penelitian 1 memiliki nilai *Negerkerke R Square* sebesar 0,050 yang bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini sebesar 5% atau dapat dikatakan bahwa variasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam penelitian ini kemandirian pemerintah daerah, ketergantungan pemerintah daerah, efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran adalah sebesar 5%, sedangkan 95% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi Model Penelitian 2

Hipotesis 5&6			
Step	2 Log Likelihood	Cox & Snell R Square	Negelkerke R Square
	940,093	0,038	0,060

Berdasarkan pada tabel 6 model penelitian 2 memiliki nilai *Negerkerke R Square* sebesar 0,060 yang bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel

independen dalam penelitian ini sebesar 6% atau dapat dikatakan bahwa variasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel moderasi dalam penelitian ini (kemandirian daerah dengan kinerja dan, ketergantungan pemerintah daerah dengan kinerja) adalah sebesar 6%, sedangkan 94% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di teliti pada penelitian ini.

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Logistik (Model Pertama)

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	KD	2.927	1.033	8.026	1	0.005	0.054
	KPP	-4.540	0.950	22.818	1	0.000	0.011
	EF	-0.031	0.049	0.413	1	0.521	0.969
	EK	0.010	0.010	0.884	1	0.347	1.010
	Constant	4.691	0.739	40.392	1	0.000	108.982

Variable(s) entered on step 1 : KD, KP, EF, EK.

Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan SPSS.

Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas, nilai variabel kemandirian daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,005 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 2.927. maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) **diterima**. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Mudhofar (2017)

Pengaruh Ketergantungan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas, nilai variabel ketergantungan pemerintah daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar -4.540. maka dapat disimpulkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H_2) **diterima**. Hasil pengujian ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Salma (2018) yang menyatakan bahwa ketergantungan daerah disebabkan oleh pemberian jaminan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan jumlah yang besar.

Pengaruh Efisiensi Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas, nilai variabel efisiensi penyerapan anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar $0,521 > \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar -0,031. maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi penyerapan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelapora keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) **ditolak**. hasil ini tidak

sesuai dengan hipotesis sebelumnya sudah dibuat yang menyatakan bahwa efisiensi penyerapan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Muraiya (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintah tidak mengikutsertakan peran dari efisiensi anggaran, dikarenakan pemegang jabatan kurang dibatasi dalam kewenangannya. Anggaran sering kali didasarkan kepada komitmen eksplisit yang dapat dicontohkan dengan gaji dan pensiun yang dapat memberikan ruang yang lebih sempit bagi mereka dalam kebijaksanaan pengambilan keputusan.

Pengaruh Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas, nilai variabel efektivitas penyerapan anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar $0,347 > \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,010. maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H_4) **ditolak**. Hasil dari pengujian ini tidak sesuai dengan hipotesis sebelumnya telah dibuat yang dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muraiya (2018) yang menyatakan bahwa efektivitas penyerapan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Efektivitas penyerapan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, kemungkinan dikarenakan perubahan kebijakan pemerintah, kepentingan politik serta ketidaksiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam prosesnya pada saat realisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 8

Hasil Uji Regresi Logistik (Model Kedua)

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	KD	14.074	6.660	4.466	1	0.035	1295055
	KPP	7.728	4.466	2.995	1	0.084	2271.266
	KI	0.000	0.000	9.211	1	0.002	1.000
	M1	0.001	0.000	6.911	1	0.009	0.999
	M2	-0.031	0.000	7.643	1	0.006	1.000
	Constant	-5.634	3.411	2.729	1	0.099	0.999

Variable(s) entered on step 1 : KD, KP, KI, M1, M2.

Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan SPSS.

Pengaruh Kinerja Dalam Memoderasi Hubungan Kemandirian Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas, nilai variabel moderasi kinerja dengan kemandirian daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,009 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,001. maka dapat disimpulkan bahwa moderasi kinerja memiliki kemampuan memoderasi hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H_5) **diterima**. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fontanella (2014), Mudhofar (2017) menyatakan bahwa kinerja tidak memiliki peran memoderasi hubungan kemandirian daerah terhadap pemerintah pusat.

Pengaruh Kinerja Dalam Memoderasi Hubungan Ketergantungan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas, nilai variabel moderasi kinerja dengan ketergantungan daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,006 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar -0,031. maka dapat disimpulkan bahwa moderasi kinerja memiliki kemampuan memoderasi hubungan ketergantungan daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keenam (H_6) **diterima**. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fontanella (2014) dan Juliawati, dkk (2012). Penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa kinerja memiliki peran memperlemah pengaruh negatif hubungan ketergantungan daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017-2018, maka disimpulkan bahwa Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Ketergantungan daerah berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia

1. Efisiensi penyerapan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Efektivitas penyerapan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Kinerja memiliki peran memperkuat pengaruh positif hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Kinerja memiliki peran memperlemah pengaruh negatif hubungan ketergantungan daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah dengan menambah variabel penelitian yang kemungkinan dapat memberikan pengaruh pada variabel dependen, agar kesimpulan yang dihasilkan memiliki cakupan yang lebih luas, menambah periode tahun penelitian, sehingga hasil penelitian mampu menghasilkan nilai observasi yang lebih baik, menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel penelitian agar informasi yang diperoleh lebih valid dan lebih menggambarkan keadaan seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia, menambahkan variasi model penelitian, dan sebaiknya untuk mengukur akuntabilitas tidak menggunakan variabel dummy.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. (2015). the Influence of Information, Organizational Objectives and Targets, and External Pressure Towards the Adoption of Performance Measurement System in Public Sector. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada*, Vol 28. No. 1. 62–83.
- Aldina, I. (2016). Pengaruh Kualitas DIPA, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran. *Jurnal Onlien Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, No. 1. 35–40.
- Amalia, A. F. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting Universitas Diponegoro*, Vol. 1, No. 1.
- Ananda, F. P. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal , Transparansi dan Kinerja terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar*, Vol. 1, No. 1
- Apriana, D. (2010). Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten Dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal Akuntansi & Investasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* Vol. 11. No. 1. 68–79.
- Damanik, C. H., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2018). Analisis Prosedur Pemungutan Dan Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi* Vol. 1. No. 04. 205–215.
- Davis, J. H. (1997). Towar A Stewardship Theory Of Management. *International Journal of Plant Science*, Vol. 158, S65–S80.
- Erryana, V. (2016). Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 5. No. 1.
- Fontanella, (2014). Pengaruh Desentralisasi fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mataram*, Vol.3. No. 1. 1–65.
- Habibi, M. (2018). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Hafidh, A. A. (2013). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Humaniora, Universitas Negeri Yogyakarta*. Vol.18. No. 2. 109–120.
- Irmawati, F. D. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan, Politik Dinasti, dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2012 – 2013. *Jurnal Akuntansi & Investasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

- Kaunang, P. D. (2013). Penerapan Asas Efisiensi Dan Asas Efektivitas dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi* Vol. 1. No. 1. 136–148.
- Moisiu, A. (2014). Decentralization and the Increased Autonomy in Local Governments. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol.109. 459–463.
- Mudhofar, K. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* Vol. 17 No. 2. 176–185.
- Muraiya, N. (2018). Pengaruh desentralisasi fiskal, efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah provinsi aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Universitas Negeri Aceh*. Vol. 3. No. 2. 236–253.
- Nurdiana N, Y. (2019). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Kementerian Keuangan Indonesia*, Publikasi.
- Nurhidayati, S. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lampung*, Vol. 7. No. 1. 13–19.
- Pandansari, T. (2016). Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto* Vol. 19. No.3. 463.
- Permana, I. A. (2015). Pengaruh Partisipasi Publik Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Study Empiris Pada SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mataram*
- Pujiati, A. (2004). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi, Universitas Negeri Semarang* Vol. 5 No.33. 61–70.
- Purbasari, H., & Andy Dwi Bayu Bawono. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta* Vol. 2. No.2. 102–108.
- Putra, A. P. (2019). Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Universitas Mataram* Vol.2. No.2.
- Qowi, R., & Prabowo, T. J. W. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2012. *Diponegoro Journal of Accounting, Universitas Diponegoro* Vol.6. No.1. 298–310.
- Richard, B. (2000). *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Safaruddin, dkk (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Universitas Hali*

Oleo. Vol. 1 No. 1. 93–105.

- Salma, N. (2018). Pengaruh Politik Dinasti Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kinerja Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Syarif Hidayatullah*, Vol. 15. No. 2,
- Septiani, R. (2015). The Influence Independent Regional, Dependence Regional, Effectiveness Realization Income Original Regional And Capital Expenditure Toward Accountability Of Local Government Financial Reporting. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana*.
- Sugiarta, B. (2018). Pengaruh Tingkat Kemandirian daerah Dan Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Lampung* Vol. 3. 224–234.
- Suyanto, S. (2017). Kajian Ketimpangan Fiskal (Fiscal Imbalance) Dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Otonom. *Jurnal Akuntansi, Universitas Dr. Soetomo*, Vol.1 No. 1. 1–21.
- Syauqi, M., dkk (2017). Strategi Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Dalam Pengelolaan APBD. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor* Vol. 9. No. 1. 1–16.
- Tamawiy, J., dkk (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing, Universitas Sam Ratulangi*.
- Yulianah, S. (2018). Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan daerah Terhadap Perumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa barat Tahun Anggaran 2010-2014. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah*.
- Zakhiya, M., & Tahar, A. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Universitas Mataram* Vol.12 No. 1. 88–99.
- Al-Quran Surah Al-Khafi Ayat 49
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
- KPK Gelar Rekonstruksi Perkara Kasus Suap Dana Perimbangan <https://www.cnnindonesia.com/> Diakses 23 Juli 2019 Pukul 20.00 WIB
- BPK. (2016). Siaran pers badan pemeriksa keuangan, <https://www.bpk.go.id/>. Diakses 23 Juli 2019 pukul 20.4

